



## **Analisis Pelayanan Konseling di Instansi Pemerintah, Dunia Industri, dan Pendidikan Non Formal**

**Dian Purbo Utomo<sup>1</sup>, Eko Nusantoro<sup>2</sup>, Anwar Sutoyo<sup>3</sup>, Boby Ardhan Nusantara<sup>4</sup>,  
Vrimadieska Ayuannisa Waluyan<sup>5</sup>, Vira Mulyawati<sup>6</sup>**

**1** Universitas Negeri Semarang,

**2** Universitas Negeri Semarang,

**3** Universitas Negeri Semarang,

**4** Universitas Negeri Semarang,

**5** Universitas Negeri Semarang,

**6** Universitas Negeri Semarang

### **Info Artikel**

Sejarah artikel:

Diterima 21 Okt 2021

Disetujui 27 Nov 2021

Dipublikasi 31 Des 2021

---

### **Keywords:**

*Pelayanan Konseling,  
Instansi Pemerintah, Dunia  
Industri, Pendidikan Non  
Formal*

---

### **Abstrak**

Pelayanan konseling merupakan upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan konselor guna memfasilitasi perkembangan konseli dalam mencapai kemandirian di kehidupan sehari-hari. Pelayanan konseling diselenggarakan melalui berbagai komponen program dan bidang layanan. Penelitian bertujuan menganalisis penyelenggaraan pelayanan konseling oleh konselor pada setting instansi pemerintah, dunia industri, dan pendidikan non formal. Penelitian dilakukan melalui metode survei deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Instrumen yang digunakan yaitu angket terkait penyelenggaraan pelayanan konseling. Populasi penelitian merupakan konselor profesional alumni program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) Jurusan Bimbingan dan Konseling (BK) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang (FIP UNNES) berjumlah 216 orang. Sampling menggunakan teknik purposive sampling sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Uji statistik deksriptif digunakan sebagai metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor profesional berkualifikasi S1 BK dan telah menempuh program PPK pada setting instansi pemerintah sebesar 63,7%, pada dunia industri sebesar 12,1%, dan pendidikan non formal sebesar 24,2%. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan analisis terhadap evaluasi kurikulum prodi PPK yang merujuk pada penyelenggaraan pelayanan konseling oleh konselor profesional di setting instansi pemerintah, dunia industri, dan pendidikan non formal.

### **Abstract**

*Counseling services are systematic, objective, logical, and sustainable and programmed efforts by counselors to facilitate the development of counselees in achieving independence in everyday life. Counseling services are provided through various program components and service areas. This study aims to analyze the*

*implementation of counseling services by counselors in the setting of government agencies, the industrial world, and non-formal education. The research was conducted through a descriptive survey method with a quantitative approach. The instrument used is a questionnaire related to the implementation of counseling services. The research population is professional counselors alumni of the Counselor Professional Education (PPK) Department of Guidance and Counseling (BK) Faculty of Education, State University of Semarang (FIP UNNES) totaling 216 people. Sampling using purposive sampling technique so that the entire population is used as a research sample. Descriptive statistical test was used as a method of data analysis. The results showed that the counseling services provided by professional counselors with a Bachelor's degree in Guidance and Counseling and who had taken the PPK program in government agency settings were 63.7%, in the industrial world by 12.1%, and in non-formal education by 24.2%. The results of the study are expected to be used as material for study and analysis of the evaluation of the PPK study program curriculum which refers to the implementation of counseling services by professional counselors in government agencies, industry, and non-formal education settings*

**How to cite:** Utomo, D., Nusantoro, E., Sutoyo, A., Nusantara, B., Waluyan, V., & Mulyawati, V. (2021). Analisis Pelayanan Konseling di Instansi Pemerintah, Dunia Industri, dan Pendidikan Non Formal. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 10(2), 111-118. <https://doi.org/10.15294/ijgc.v10i2.68172>

 This article is licensed under: CC-BY

---

Universitas Negeri Semarang 2021

e-ISSN 2597-6133, p-ISSN 2252-6374

---

✉ Alamat korespondensi:  
[purbo@mail.unnes.ac.id](mailto:purbo@mail.unnes.ac.id)  
Universitas Negeri Semarang

## PENDAHULUAN

Program studi PPK merupakan pendidikan profesi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kompetensi konselor. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Konselor dalam sistem pendidikan nasional merupakan pendidik, yang sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur. Kualifikasi akademik konselor dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor dinyatakan bahwa Konselor merupakan pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi BK serta program PPK pada perguruan tinggi penyelenggara yang terakreditasi.

Pelayanan BK atau lebih khusus lagi disebut pelayanan konseling adalah upaya yang sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan konselor atau guru BK guna memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mencapai kemandirian dalam kehidupannya (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang BK pada Pendidikan Dasar dan Menengah). Pelayanan konseling diselenggarakan oleh konselor sebagai pendidik profesional berkualifikasi akademik minimal S-1 bidang BK dan telah lulus program PPK terhadap konseli sebagai penerima layanan.

Pelayanan konseling adalah pekerjaan yang profesional, yang berarti pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran/kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan Pendidikan profesi (UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Selaras itu, Prayitno (2013:85) menyatakan bahwa pelayanan konseling merupakan pelayanan bantuan oleh tenaga profesional kepada individu atau kelompok guna pengembangan kehidupan efektif sehari-hari dan penanganan kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dengan berfokus pada pribadi mandiri yang mampu mengendalikan diri dengan penyelenggaraan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung.

Pelayanan konseling diselenggarakan melalui berbagai komponen program dan bidang layanan konseling. Komponen program layanan konseling meliputi layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif serta dukungan sistem, sedangkan bidang layanan konseling meliputi bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir (Permendikbud RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang BK pada Pendidikan Dasar dan Menengah). Pelayanan konseling yang diselenggarakan konselor profesional yaitu telah menempuh S1 BK dan program PPK menjadi urgen untuk diungkapkan guna mengetahui apakah

penyelenggaraan pelayanan konseling yang dimaksudkan sudah sesuai dengan komponen program dan bidang layanan konseling.

Konselor sebagai pendidik profesional diharapkan dapat menyelenggarakan pelayanan konseling terhadap konseli pada jalur informal, formal dan nonformal sesuai tujuan pendidikan. Habsy (2017) menyampaikan bahwa perkembangan pelayanan konseling sekarang ini tidak hanya terbatas pada *setting* sekolah, melainkan menjangkau bidang-bidang di luar sekolah sehingga memberikan nuansa dan corak dalam penyelenggaraan pelayanan konseling demi upaya pengembangan individu yang lebih sensitif, antisipatif, proaktif, dan responsif terhadap kebutuhan serta tuntutan perkembangan individu dan masyarakat. Lebih lanjut, konselor profesional diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki individu atau konseli, tidak hanya dalam *setting* sekolah saja melainkan penyelenggaraan konseling di instansi pemerintah, dunia industri, dan pendidikan non formal.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada konselor profesional berkualifikasi akademik S1 BK dan alumni program PPK Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang bekerja pada BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat mengungkapkan bahwa pelayanan konseling yang diselenggarakan meliputi pelayanan informasi kependudukan dan KB, konseling keluarga remaja dan remaja, konseling pranikah, konseling keluarga balita dan balita, konseling KB dan kesehatan reproduksi, konseling keluarga lansia dan lansia, pembinaan usaha ekonomi produktif kelompok UPPKS serta konseling khusus keluarga (*Married Konseling*). Hal ini mengindikasikan bahwa komponen program layanan konseling yang dilakukan masih pada ranah layanan dasar, peminatan dan perencanaan individual serta responsif. Dukungan sistem belum begitu optimal dilaksanakan pada *setting* penyelenggaraan pelayanan konseling yang dimaksudkan.

Kondisi penyelenggaraan pelayanan konseling yang meliputi komponen program layanan konseling yang belum sepenuhnya optimal dilaksanakan oleh konselor profesional sebagai alumni program PPK. Hendaknya penyelenggaraan pelayanan konseling tersebut dapat dianalisis secara lebih lanjut beserta bidang pengembangannya pada *setting* instansi pemerintah, dunia industri, dan pendidikan non formal guna memperoleh gambaran nyata terkait pengimplementasian pelayanan konseling oleh konselor profesional. Berkaitan hal itu, penelitian bertujuan mendeskripsikan kondisi pelayanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor profesional alumni program PPK pada *setting* instansi pemerintah, dunia industri, dan pendidikan non formal.

## METODE

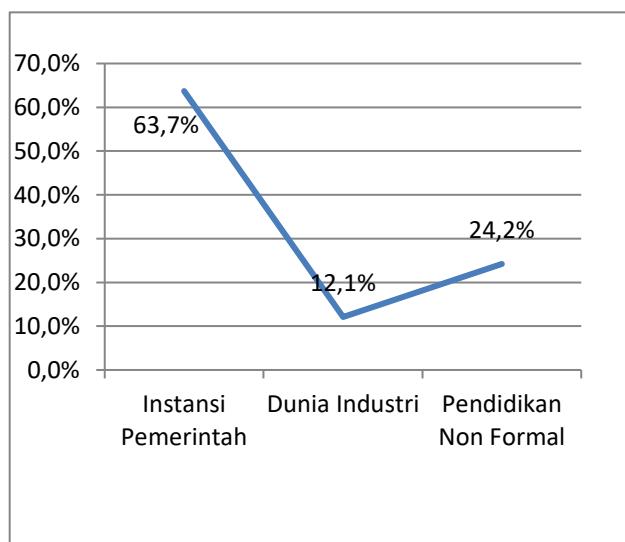
Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan survei deskriptif (Best, J. W., & Kahn, J. V. 2016; Kim, S. 2013) melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan kepada alumni program PPK Jurusan BK FIP UNNES yang berjumlah 216 orang. Sampling yang dilakukan melalui teknik purposive sampling sehingga keseluruhan populasi dijadikan sampel penelitian.

Instrumen penelitian menggunakan angket terkait penyelenggaraan pelayanan konseling yang dilakukan oleh konselor profesional di *setting* instansi pemerintah, dunia industri, dan pendidikan non formal. Data hasil angket dihitung secara statistik melalui perhitungan persentase dan dianalisis kemudian dideskripsikan untuk membuat kesimpulan-kesimpulan

## HASIL

Hasil penelitian dapat terdiri dari statistika deskriptif, hasil uji asumsi, dan hasil uji hipotesis dan kemudian dianalisis secara kritis (maks 20% dari keseluruhan halaman naskah) dipaparkan secara berurutan atau terpadu (font Palatino Linotype 11 spasi 1,15).

Data hasil angket memberikan gambaran tentang penyelenggaraan pelayanan konseling yang dilakukan konselor profesional berkualifikasi S1 bidang BK dan telah menempuh program PPK pada berbagai *setting* layanan. Gambaran data yang dimaksud secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 1. Penyelenggaraan Pelayanan Konseling oleh Konselor Profesional

Hasil angket terkait penyelenggaraan pelayanan konseling oleh konselor profesional di instansi pemerintah, dunia industri, dan pendidikan non formal menunjukkan bahwa komponen program layanan konseling sudah

terimplementasikan. Kegiatan dalam komponen layanan dasar yang dilakukan konselor profesional dengan melaksanakan asesmen kebutuhan atau pengumpulan data konseli, pengelolaan media informasi, dan bimbingan kelompok. Layanan peminatan dan perencanaan individual dilakukan melalui pemanfaatan hasil aplikasi instrumentasi serta pelayanan penempatan dan penyaluran bagi konseli. Bantuan yang diberikan dalam layanan responsif dengan melaksanakan kegiatan konseling individual dan kelompok serta konseling krisis dan layanan konsultasi.

Kegiatan pengembangan jejaring dan keprofesian secara berkelanjutan dilakukan oleh konselor profesional agar mendapat dukungan sistem demi terlaksananya pelayanan konseling secara efektif dan efisien. Konselor profesional yang menyelenggarakan pelayanan konseling di instansi pemerintah, dunia industri, dan pendidikan non formal melakukan pengembangan atau pembinaan bidang-bidang dalam pengembangan kehidupan pribadi dan sosial, kemampuan belajar dan keputusan arah karir, kehidupan perkawinan dan keluarga serta beragama.

## PEMBAHASAN

Konselor profesional berkualifikasi S1 BK dan telah menempuh program PPK menyelenggarakan pelayanan konseling pada *setting* instansi pemerintah sebesar 63,7%, dunia industri sebesar 12,1%, dan pendidikan non formal sebesar 24,2%. Diniaty (2013) menyampaikan konselor yang memilih bekerja di lingkungan masyarakat bisa jadi pada instansi pemerintah, dunia industri, dan pendidikan non formal berkesempatan untuk melayani konseli atau orang yang memiliki kekurangan, pecandu, orang tua, orang yang terganggu mentalnya, pegawai pemerintah dan militer serta pegawai di perusahaan besar. Penyelenggaraan pelayanan konseling di *setting* instansi pemerintah, dunia industri, dan pendidikan non formal memiliki tugas serta tantangan yang banyak.

Analisis penyelenggaraan pelayanan konseling oleh konselor profesional pada *setting* instansi pemerintah, dunia industri, dan pendidikan non formal diimplementasikan dalam komponen-komponen program dan bidang layanan konseling. Pengimplementasian komponen program dan bidang layanan konseling pada *setting* instansi pemerintah, dunia industri, dan pendidikan non formal dikaitkan dengan penelitian Kumara (2017) bahwa layanan dasar bisa berupa bimbingan klasikal dan kelompok serta pengembangan media konseling; layanan peminatan dan perencanaan individual berupa layanan peminatan dalam format individu maupun kelompok dan layanan konsultasi; layanan responsif diperuntukan guna membantu konseli yang mengalami kesulitan atau hambatan, dapat berupa konseling perorangan; dan dukungan sistem berupa kegiatan kolaborasi bersama orangtua, keluarga konseli, psikolog, dan stakeholder lainnya guna mengetahui dukungan yang diberikan kepada konseli. Hal ini dapat dipahami bahwa komponen program layanan konseling meliputi layanan dasar,

layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif serta dukungan sistem dapat diimplementasikan di berbagai *setting* pelayanan konseling.

Lebih lanjut dikaitkan dengan penelitian Kurniawan (2020) bahwa pelaksanaan pelayanan konseling merupakan usaha strategis guna memfasilitasi perkembangan konseli secara komprehensif dalam aspek bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sesuai penelitian itu dapat dipahami bahwa pelayanan konseling melaksanakan pengembangan bidang-bidang kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir konseli.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor profesional berkualifikasi S1 BK dan telah menempuh program PPK pada *setting* instansi pemerintah sebesar 63,7%, pada dunia industri sebesar 12,1%, dan pendidikan non formal sebesar 24,2%. Penyelenggaraan pelayanan konseling oleh konselor profesional pada berbagai *setting* diimplementasikan ke dalam komponen program dan bidang-bidang layanan konseling.

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, diharapkan konselor profesional berkualifikasi S1 bidang BK dan telah menempuh program PPK dapat menyelenggarakan pelayanan konseling secara lebih meluas lagi dalam berbagai lingkup atau *setting* pelaksanaan. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan analisis terhadap evaluasi kurikulum prodi PPK yang merujuk pada penyelenggaraan pelayanan konseling oleh konselor profesional di *setting* instansi pemerintah, dunia industri, dan pendidikan non formal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Best, J. W., & Kahn, J. V. (2016). *Research in education*. Pearson Education India.
- Diniaty, A. (2013). Peluang dan Tantangan Pelayanan Konseling pada Setting Masyarakat di Indonesia (Perspektif dari Perkembangan Konseling Setting Masyarakat di Amerika). *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 1(1), 27-35.
- Habsy, B. A. (2017). Filosofi Keilmuan Bimbingan Konseling. *Jurnal Pendidikan*, 2(1), 1.
- Kumara, A. R. (2017). *Strategi Bimbingan dan Konseling Komprehensif dalam Perencanaan Karir Siswa SMP*. G-COUNS Jurnal Bimbingan dan Konseling, 1(2): 180-11.
- Kurniawan, N. A. (2020). *Analisis Kebutuhan Materi Bimbingan dan Konseling Siswa SMK di Era Merdeka Belajar*. Prosiding Seminar & Lokakarya Nasional Bimbingan dan Konseling 2020.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.*

Prayitno. ( *Konseling Integritas*. Padang: UNP Press.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*